

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan terhambatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan ini dapat diatasi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor perbankan ikut berperan serta dalam meningkatkan perekonomian, diantaranya dengan peningkatan iklim usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui penyediaan modal. Umumnya penyediaan modal yang dilakukan oleh bank berupa kredit. Kredit akan menarik masyarakat untuk memulai usaha-usaha baru. Selain itu, kredit juga membantu masyarakat pemilik usaha produktif namun mengalami keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.

Kredit menjadi salah satu solusi yang menarik bagi masyarakat, akan tetapi dalam memperoleh kredit ini tidak mudah khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu bentuk alternatif untuk mendukung pengembangan perekonomian di Indonesia. Persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh kredit menjadi kendala bagi pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Kendala ini membuat pemerintah memberikan penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat adalah pemberian modal kerja dan investasi yang diberikan kepada UMKM dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan di Indonesia membuat masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis. Lembaga perbankan harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dengan meningkatkan kinerja agar

dapat bertahan dalam situasi krisis atau memenangkan persaingan dalam era globalisasi.

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, yang berarti bank akan memberikan kredit jika bank yakin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bank akan melakukan proses analisis kredit terlebih dahulu sebelum calon debitur dikatakan layak untuk menerima fasilitas kredit. Kelayakan kredit dapat dinilai dengan menggunakan beberapa metode yaitu analisis kredit 5C, analisis laporan keuangan, dan analisis perhitungan kebutuhan kredit modal usaha. Analisis yang digunakan adalah analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral*. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur.

Pemberian kredit kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan. Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur.

Pemberian kredit memiliki risiko salah satunya adalah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). *Non Performing Loan* merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bank dan menggambarkan tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Depok Nusantara sebagai salah satu bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat kepada masyarakat tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah.

Risiko dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dapat diperkirakan oleh menggunakan suatu proses yang disebut analisis kredit. Analisis kredit dapat diterapkan oleh bank. Melakukan analisis kredit bertujuan untuk menentukan kesianggupan dan kesungguhan seorang peminjam dana untuk membayar kembali sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman.

Dengan adanya resiko dalam pemberian kredit ini pihak bank harus melakukan pengamanan yang bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi resiko tersebut agar tidak terjadi kredit bermasalah. Sehingga bank harus berupaya meningkatkan keamanan dalam proses sistem pemberian kredit. Usaha untuk mengurangi resiko yang akan timbul dalam proses pemberian kredit bermasalah, perusahaan bisa memperketat dan mengevaluasi prosedur pemberian kredit, dengan cara melakukan pengendalian internal.

BRI fokus menekan rasio kredit bermasalah. Hingga semester 2017, rasio kredit bermasalah masih dibawah 3%. Maka dari itu sebelum rasio kredit meningkat maka Direktur Utama BRI Supratjo ingin membenahi permasalahan ini. Karena sebagian besar kredit bermasalah BRI berasal dari segmen kredit ritel dan komersial yang didominasi sektor perdagangan. Selain itu segmen usaha kecil menengah juga berkontribusi terhadap rasio *Non Performing Loan*. Dalam UMKM, kredit mikro masih memegang porsi terbesar Rp. 216,1 Triliun. Adapun NPL gross pada kuartal 2017 tercatat sebesar 2,16%. Angka ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 2,22%. Untuk mengurangi NPL pihak manajemen mengadakan review bagaimana sistem pengendalian internal di BRI.

Pengendalian internal yang bagus sebagai dasar agar kegiatan operasional bank dan manajemen juga berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah atau menjaga agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan dapat melacak bila terjadi kesalahan-kesalahan sehingga dapat dikoreksi.

Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar.

Sistem pengendalian internal harus menjadi perhatian khusus oleh bank, mengingat bahwa salah satu faktor terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bank antara lain kurangnya pengawasan, kurang memadai pelaksanaan identifikasi dan penilaian resiko dari kegiatan operasional bank. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul:

**“ EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) “**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tahap-tahap prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh BRI Unit Depok Nusantara?
2. Bagaimana peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit usaha rakyat dalam melakukan pengendalian internal KUR?
3. Apa yang dilakukan BRI Unit Depok Nusantara dalam tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit bermasalah (*Non Performing Loan*)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan mengadakan suatu penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur yang berlaku di Bank Rakyat Indonesia unit Depok Nusantara dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
2. Untuk mengetahui peran dari pihak-pihak Bank Rakyat Indonesia unit Depok Nusantara yang terlibat dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dalam melakukan pengendalian internal untuk mencegah resiko kredit.
3. Mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya mencegah kredit bermasalah dan penyelesaiannya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada Penulis terhadap masalah pengendalian internal sebagai matakuliah yang menjadi fokus bagi diri penulis serta mempersiapkan syarat kelulusan kuliah Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk semakin memajukan perusahaan, khususnya agar terdapat perbaikan dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal pemberian kredit mikro sehingga semakin efektif.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa subbab yang saling berkaitan. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui awal dari penelitian ini dilakukan dan alasan melakukan penelitian di tempat yang telah ditentukan sebagai objek penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

**Bab 2 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penulisan skripsi dan berisi landasan teori bagi permasalahan yang dibahas yaitu Pengendalian Internal dalam pemberian kredit usaha rakyat.

**Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, yang meliputi strategi penelitian, unit analisis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil pengolahan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis dalam menjawab hipotesis penelitian

**Bab 5 Simpulan**

Bab ini berisi simpulan dari penelitian, saran, keterbatasan penelitian, dan pengembangan penelitian yang berikutnya.